

## Siaran Pers

### **PERKUAT AKSES KEADILAN, KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS LUNCURKAN BUKU EKSISTENSI PERADILAN ADAT**

**JAKARTA** (13/12) – Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional meluncurkan buku “Eksistensi Peradilan Adat: Pengalaman Aceh, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah”. Penulisan buku ini merupakan bagian dari agenda Strategi Nasional Akses Pada Keadilan (SNAK) 2016-2019 yang telah diluncurkan pada 10 Mei 2016. Salah satu tujuan utama SNAK 2016-2019 adalah memperkuat akses pada keadilan melalui peradilan adat/informal terhadap warga negara Indonesia. Pemerintah mendorong serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses pada keadilan. SNAK 2016-2019 diharapkan berkontribusi dalam rangka pelaksanaan *restorative justice* yang pada akhirnya dapat mengurangi beban lembaga pemasyarakatan.

Peluncuran buku diresmikan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dan dihadiri Direktur UNDP Indonesia Christophe Bahuét serta Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran dan Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola. Penulisan buku ini merupakan hasil kerja sama antara Kementerian PPN/Bappenas dan UNDP Indonesia dalam proyek *Strengthening Access to Justice in Indonesia* (SAJI) yang didukung Kedutaan Besar Norwegia. Buku ini ditulis berdasarkan praktik-praktik dan pembelajaran pelaksanaan Peradilan Adat oleh Majelis Adat Aceh (MAA), Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Tengah, dan Forum Peradilan Adat (FPA), Sulawesi Tengah.

“Secara historis, keberadaan hukum dan juga peradilan adat terutama di desa-desa memang tidak pernah mati, baik dalam bentuknya yang sederhana maupun yang terlembaga masih terus digunakan oleh masyarakat di daerah sebagai sarana untuk menyelesaikan berbagai sengketa/konflik dan persoalan seperti pelanggaran atas tata perilaku, baik antar sesama masyarakat maupun dengan alam dan lingkungan sekitarnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa peradilan adat secara umum dapat memenuhi rasa keadilan bagi para individu yang berperkara dan menjaga perdamaian bagi anggota masyarakat secara kolektif “ ungkap Menteri Bambang saat memberikan pidato.

Dalam enam tahun terakhir, Bappenas bekerja sama dengan UNDP Indonesia bersama dengan MAA, DAD, dan FPA telah memperkuat kualitas peradilan informal atau peradilan adat di tiga daerah pilot. Upaya ini berhasil dan 90 persen masyarakat pengguna pelayanan peradilan menyatakan puas dengan kualitas pelayanan yang diberikan dan lebih banyak lagi pemerintah distrik yang mengalokasikan dana bagi mekanisme peradilan adat. Sinergi antara sistem peradilan adat dengan sistem peradilan formal meningkat dan kaum perempuan semakin terlibat dalam peradilan adat. Misalnya, di Provinsi Aceh, sejak 2012 hingga 2015, 28 persen dari 4000 pemuka adat atau 1120 orang yang telah dilatih adalah perempuan. Proyek yang didanai oleh pemerintah Norwegia ini bertujuan memperbaiki akses dan pelayanan peradilan kepada kaum perempuan, warga yang tidak mampu, rentan dan terpinggirkan lewat reformasi kebijakan, undang-undang dan peraturan selain juga memperkuat kapasitas pelayanan pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk mengimplementasi SNAK 2016-2019. ■

Jakarta, 14 Desember 2016

Thohir Afandi  
Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan  
Kementerian PPN/Bappenas

Untuk informasi lebih lanjut:  
Sekretariat Stranas Akses Pada Keadilan  
Kementerian PPN/Bappenas  
Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310  
Telp/Fax: 021-3924446;  
Email: [diani@bappenas.go.id](mailto:diani@bappenas.go.id)